

**JUDUL : PEMALSUAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

Nama : Danny Firmansyah  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Suhariwanto, S.H., M.Hum., Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H.,  
M.Hum.

**ABSTRAK**

Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (RS) yaitu yang melakukan pemalsuan surat izin usaha perikanan (SIUP) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada kasus pelaku (RS) yang melakukan pemalsuan surat izin usaha perikanan (SIUP) Penuntut Umum dalam dakwaannya mendasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal perbuatan yang dilakukan oleh RS adalah pemalsuan SIUP yang merupakan tindak pidana dibidang Perikanan dan terdapat sanksi pidana khusus yang mengaturnya. Sesuai dengan asas hukum yang dianut di Indonesia yakni asas *lex specialis derogat legi generali*, RS dapat dikenakan ketentuan Pasal 94A jo. Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**Kata Kunci** : pemalsuan, perikanan, surat izin usaha perikanan, *lex specialis derogat legi generali*.

**TITLE : PEMALSUAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

Name : Danny Firmansyah  
Discipline/Study Programme : Ilmu Hukum  
Contributor : Suhariwanto, S.H., M.Hum., Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H.,  
M.Hum.

**ABSTRACT**

*This thesis is intended to analyze the act done by the perpetrator (RS) that is to make the falsification of fishing business permit (SIUP) result from law number 45 year 2009 concerning changes to law number 31 year 2004 about fisheries. This research is normative juridical. The results of the research concluded in the case of perpetrator (RS) who falsified the fishery business permit (SIUP) the prosecutor in his indictment based on Article 263 paragraph (1) and paragraph (2) jo. Article 55 paragraph (1) 1st KUHP, even though the actions taken by RS are falsification of SIUP which is a criminal act in the fisheries sector and there are specific criminal sanctions regulating it. In accordance with the legal principles adopted in Indonesia, namely the principle of *lex specialis derogat legi generali*, RS can be imposed article 94A jo. article 28A of law number 45 year 2009 concerning changes to law number 31 year 2004 about fisheries.*

**Keywords** : *falsification, fisheries, fishery business permit, *lex specialis derogat legi generali*.*